

ABSTRACT

Children are the most important part of a family entitled to a moral, mental, and balanced legal education. Parents have an important role in giving everything and are fully responsible for mental and child development. The research method used in this thesis is sociological yuridis using secondary data then continued with primary data that directly plunge into the field to obtain the data, the interview conducted in Unit PPA Polres Pati. Based on the data on Bareskrim, in the period of 2014, there were 382 cases. While 2015 as many as 574 cases. Then, in mid-2016 there were recorded 26 cases. The amount is not yet included in all parts of Indonesia. The protection of child victims of domestic violence shall be regulated in Law Number 35 Year 2014 on Amendment to Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, also regulating special protection for child victims of domestic violence. Legal protection for children is also enshrined in the amended 1945 Constitution Article 28B Paragraph 2 which reads: "Every child shall have the right to survive, to grow and to develop and to be entitled to protection from violence and discrimination". As for problems faced Unit PPA Polres Pati any case violence in the house ladders entering the PPA Unit, whether it be a police report or a public complaint will be completed in the investigation process.

Keywords: Child, Legal protection for children, Legal sanction.

ABSTRAK

Anak adalah bagian terpenting dari sebuah keluarga yang berhak mendapatkan pendidikan moral, mental, serta perlindungan hukum yang seimbang. Orang tua memiliki peran penting dalam memberi segala sesuatunya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mental dan tumbuh kembang anak. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis sosiologis yang menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer yang langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data, wawancara dilakukan di Unit PPA Polres. Data kekerasan terhadap anak kian tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikantongi Bareskrim, pada periode 2014 ada 382 perkara. Sedangkan 2015 sebanyak 574 perkara. Kemudian, di pertengahan 2016 tercatat ada 26 kasus. Jumlah itu belum termasuk di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur juga tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang telah diamanemen yang isinya : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun permasalahan yang dihadapi Unit PPA Polres Pati yaitu setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Unit PPA, entah itu laporan polisi atau pengaduan masyarakat akan selesai pada proses penyelidikan.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan hukum terhadap anak, Sanksi hukum